



**SALINAN
PERATURAN BUPATI PONTIANAK
NOMOR 6 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS
BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK**



TAHUN 2014



BUPATI PONTIANAK

SALINAN

**PERATURAN BUPATI PONTIANAK,
NOMOR 6 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PONTIANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri berdasarkan biaya riil atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
 - b. bahwa agar perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat Negara, anggota dewan perwakilan rakyat daerah, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pontianak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pontianak.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5104);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1).

15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 5)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PONTIANAK TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pontianak
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas ekonomi dan tugas/pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kabupaten Pontianak selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pontianak.
5. Bupati adalah Bupati Pontianak.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pontianak.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pontianak.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak.
10. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak.
11. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara pada Pemerintah Kabupaten Pontianak yaitu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak.
12. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Pontianak.
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Pasal 4

Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas :

- (1) Biaya transportasi yang meliputi transportasi pergi dan pulang, transportasi bandara (dari tempat keberangkatan, bandara keberangkatan, sampai ke tempat tujuan), dan angkutan setempat (transportasi local) yang diberikan dalam bentuk lumpsum;
- (2) Penggantian uang tiket pesawat dan airport tax;
- (3) Uang harian yang meliputi uang makan dan uang saku, diberikan dalam bentuk lumpsum.

Pasal 5

Khusus untuk keperluan menjemput/mengantarkan jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas, diberikan tambahan biaya angkutan jenazah yang terdiri dari biaya pemetaan dan biaya angkutan jenazah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 6

- (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terlebih dahulu harus mendapatkan SPT dan SPD yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) SPT dapat diterbitkan atas beberapa orang personil, sedangkan SPD berlaku untuk 1 (satu) orang personil.
- (3) Pembuatan SPT dan SPD harus ditetapkan pada hari kerja.

BAB II PERJALANAN DINAS

Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas dilaksanakan dalam rangka untuk :
 - a. Melakukan rapat kerja, konsultasi/koordinasi, asistensi, pembinaan dan monitoring;
 - b. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan diluar tempat kedudukan;
 - c. Mengikuti pendidikan dinas diluar tempat kedudukan;
 - d. Kegiatan kaji terap, workshop;
 - e. Kegiatan kursus-kursus, bimbingan teknis, pelatihan dan lain-lain yang sejenis;
 - f. Kegiatan pemeriksaan, pengawasan dan atau audit, kegiatan uji tera, penelitian dan survey;
 - g. Menghadiri undangan resmi lainnya atas persetujuan dan penugasan pimpinan.
- (2) Waktu perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi adalah paling lama 3 (tiga) hari, termasuk hari berangkat dan hari kembali. ✓
- (3) Untuk perjalanan dinas dalam rangka kaji terap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, waktu perjalanan dinas adalah paling lama 5 (lima) hari. ✓
- (4) Biaya dalam rangka mengikuti sosialisasi, kursus, bimtek dan pelatihan serta kegiatan sejenis lainnya yang mewajibkan peserta menyetorkan biaya kontribusi, menggunakan dana pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber

- (5) Dalam hal jangka waktu perjalanan dinas melebihi batas waktu yang ditentukan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah atau Pejabat yang berwenang.

BAB III BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan berdasarkan satuan biaya yang masing-masing jenisnya terdiri dari :
- Biaya Transportasi;
 - Biaya Penginapan;
 - Uang Harian; dan/atau
 - Uang Representasi.
- (2) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- Biaya tiket pesawat, yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil untuk perjalanan dinas luar daerah dan perjalanan dinas dalam daerah; dan
 - Biaya airport tax; -
- (3) Sepanjang transportasi ke tempat tujuan tugas dapat ditempuh dengan perjalanan dinas langsung tidak diperkenankan menggunakan jalur transit yang menyebabkan adanya penambahan biaya transportasi.
- (4) Apabila pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak sesuai dengan jadwal penerbangan atau karena keadaan/alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat dilaksanakan dengan penerbangan transit.
- (5) Dalam hal harga tiket yang diperoleh ternyata dibawah harga yang tercantum dalam Standar Biaya yang ditetapkan, maka Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan biaya tiket yang diterima kepada Bendaharawan Pengeluaran pada SKPD yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan biaya terhadap harga riil tiket, maka Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan dapat mengajukan penggantian kekurangan tersebut kepada Bendaharawan Pengeluaran pada SKPD yang bersangkutan sepanjang tidak melampaui batas maksimal harga tiket seperti tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (7) Dalam keadaan luar biasa apabila terjadi penundaan kegiatan secara mendadak oleh pihak penyelenggara dimana tiket sudah diperoleh dan yang bersangkutan belum berangkat ketempat tujuan, maka tiket untuk keberangkatan dapat dibayarkan/diganti dengan memberikan/melampirkan bukti pembatalan kegiatan.
- (8) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang bersangkutan sudah berangkat ketempat tujuan, maka tiket dan biaya lainnya yang telah dikeluarkan dapat dibayarkan/diganti dengan memberikan/melampirkan bukti pembatalan kegiatan dan bukti pengeluaran lainnya.
- (9) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan dihitung sebesar hari penugasan dikurangi 1 (satu) hari.
- (10) Dalam hal biaya penginapan yang diperoleh ternyata dibawah harga yang tercantum dalam standar biaya yang ditetapkan, maka Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap

14. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
15. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan satuan kerja perangkat daerah yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil daerah.
16. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas keluar dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan baik kedalam maupun keluar daerah dalam wilayah Negara Republik Indonesia atas perintah pejabat yang berwenang dengan akuntabilitas penggunaan dana perjalanan dinas melalui penerapan pembayaran tiket kapal laut, pesawat (termasuk boarding pass dan airport tax), biaya penginapan sesuai biaya riil (at cost).
17. Perjalanan dinas Luar Daerah berdasarkan biaya riil (at cost) dibayarkan khusus tiket pesawat (termasuk boarding pass dan airport tax) dan biaya penginapan.
18. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan menuju ibukota negara atau provinsi atau kabupaten/kota diluar wilayah Kabupaten Pontianak.
19. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan menuju ibukota kabupaten, kecamatan dan desa didalam wilayah Kabupaten Pontianak dengan jarak tempuh lebih dari 5 km.
20. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
21. Surat perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Naskah Dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
22. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah surat perintah kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 2

Biaya Perjalanan Dinas dibagi dalam 6 (enam) golongan, yaitu :

- (1) Golongan Pertama untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD
- (2) Golongan Kedua untuk Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD
- (3) Golongan Ketiga untuk Pejabat Eselon II
- (4) Golongan Keempat untuk Pejabat Eselon III dan PNS Golongan IV
- (5) Golongan Kelima untuk Pejabat Eselon IV dan PNS Golongan III
- (6) Golongan Keenam untuk PNS Golongan II dan Golongan I

Pasal 3

- (1) Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, CPNS dan PTT yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah Pejabat yang berwenang.
- (2) Keikutsertaan CPNS dan PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam perjalanan dinas dikarenakan sangat diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan

- (11) Dalam hal terjadi kekurangan biaya terhadap biaya riil penginapan, maka Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan dapat mengajukan penggantian kekurangan tersebut kepada Bendaharawan Pengeluaran pada SKPD yang bersangkutan sepanjang tidak melampaui batas maksimal biaya penginapan seperti tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (12) Dalam hal Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan tidak menggunakan biaya penginapan, maka biaya penginapan diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif biaya penginapan dikota tempat tujuan sebagaimana diatur dalam lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (13) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan secara lumpsum, yang terdiri dari :
 - a. Uang makan;
 - b. Uang saku; dan
 - c. Biaya transport bandara/transport lokal
- (14) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibayarkan secara lumpsum dan diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II selama melakukan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (15) Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas untuk pegawai tidak tetap yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan negara/daerah ditentukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan tingkat pendidikan yang bersangkutan.
- (16) Rincian fasilitas dan tarif transportasi serta besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, III dan IV Peraturan Bupati ini.
- (17) Dalam hal biaya perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas di luar ibukota kabupaten tidak dapat dibuktikan pembayarannya dengan tiket, maka tanda bukti pembayaran dapat menggunakan surat pernyataan personil yang melaksanakan tugas dengan disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (3) sebelum perjalanan dinas dilakukan dan dibayarkan sesuai dengan lamanya waktu melakukan perjalanan dinas.
- (2) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran SKPD yang mengeluarkan SPD bersangkutan.
- (3) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran SKPD yang bersangkutan.

Pasal 10

Dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam waktu yang bersamaan.

Pasal 11

Apabila biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan g dimana akomodasi dan konsumsi ditanggung penyelenggara, maka biaya perjalanan dinas yang dibayarkan hanya berupa biaya transportasi dan uang saku.

BAB IV PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 12

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPT dan SPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran III dan IV.
- (2) Penandatanganan SPT dan SPD diatur sebagai berikut :
 - a. Untuk Bupati dan Wakil Bupati
Bagi Bupati dan Wakil Bupati, SPT dan SPD ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan maka SPT dan SPD ditandatangani oleh Wakil Bupati.
 - b. Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD
Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, SPT dan SPD ditandatangani oleh Ketua DPRD, dalam hal Ketua DPRD berhalangan maka SPT dan SPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Ketua DPRD.
 - c. Untuk PNS dalam lingkungan Sekretariat Daerah :
 1. Bagi Sekretaris Daerah, SPT dan SPD ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan, maka SPT dan SPD ditandatangani oleh Wakil Bupati.
 2. Bagi Pejabat Eselon II SPT ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan, maka SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati, sedangkan SPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, maka SPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Sekretaris Daerah.
 3. Bagi Pejabat Eselon III, Eselon IV dan staf SPT dan SPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Pontianak, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, maka SPT dan SPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Sekretaris Daerah.
 - d. Untuk PNS pada SKPD diluar Sekretariat Daerah diatur sebagai berikut :
 1. Bagi Kepala SKPD, SPT ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan, maka SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati, sedangkan SPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Pontianak, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, maka SPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Sekretaris Daerah.
 2. Bagi Pejabat Eselon III, Eselon IV dan Staf, SPT dan SPD ditandatangani oleh Kepala SKPD, dalam hal Kepala SKPD berhalangan, maka SPT dan SPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Kepala SKPD.
 - e. Untuk PNS pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten Pontianak diatur sebagai berikut :
 1. Bagi Kepala UPT, SPT dan SPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membawahi UPT, dalam hal Kepala SKPD berhalangan, maka SPT dan SPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Kepala SKPD.

2. Bagi Pejabat lainnya dan staf, SPT dan SPD ditandatangani oleh Kepala UPT, dalam hal Kepala UPT berhalangan, maka SPT dan SPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Kepala UPT.
- f. Untuk Pegawai Tidak Tetap, SPT dan SPD ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan, SPT dan SPD ditandatangani oleh Wakil Bupati dan apabila Wakil Bupati berhalangan maka SPT dan SPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 13

Untuk perjalanan dinas ke dalam dan luar daerah, halaman belakang SPD dilegalisir atau ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang/pihak terkait di daerah yang dituju sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Pengembalian SPT, SPD dan pelaporan diatur sebagai berikut :

- (1) Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah, diwajibkan untuk menyerahkan SPD yang telah dilegalisasi sebagaimana dimaksud Pasal 14, paling lama 5 (lima) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas, dengan melampirkan tiket pesawat, boarding pass, airport tax dan bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
- (2) Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas Dalam Daerah, diwajibkan untuk menyerahkan SPD yang telah dilegalisasi sebagaimana dimaksud Pasal 14, paling lama 5 (lima) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas.
- (3) Menyampaikan laporan secara tertulis terhadap setiap hasil pelaksanaan tugas kepada Pejabat yang berwenang memberikan SPT dan SPD.

Pasal 15

- (1) Pejabat yang berwenang dapat membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan untuk efisiensi.
- (2) Pejabat yang berwenang dan Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa :
 - a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.
- (4) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat juga diberlakukan apabila SPD yang tidak diselesaikan tepat pada waktunya setelah mendapat teguran tertulis.

Pasal 16

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 9, Pasal 12 dan Pasal 13 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Khusus menyangkut perjalanan dinas luar negeri, semua pengeluaran biayanya berpedoman pada ketentuan tentang perjalanan dinas luar negeri yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pontianak Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Pebruari 2014

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pontianak.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 28 - 1 - 2014

BUPATI PONTIANAK,
ttd
RIA NORSAN

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 3 - 2 - 2014
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

ttd

FIRMAN JULI PURNAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2014 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK



MOR : 6 TAHUN 2014

NGGAL : 28 Januari 2014

TANG : Perjalanan Dinas Dalam Negeri atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak

YA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN

TUJUAN	TRANSPORTASI (PP)
Sungai Kunyit	Rp 50,000.00
Toho	Rp 100,000.00
Sungai Pinyuh	Rp 50,000.00
Siantan	Rp 100,000.00
Sadaniang	Rp 175,000.00
Anjungan	Rp 75,000.00
Segedong	Rp 100,000.00

AYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KE DALAM DAERAH KABUPATEN

PATI DAN PRD	SEKRETARIS DAERAH DAN ANGGOTA DPRD (Rp)	PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III DAN PNS GOLONGAN IV (Rp)	PEJABAT ESELON IV DAN PNS GOLONGAN III (Rp)	PNS GOLONGAN II DAN GOLONGAN I (Rp)
	325,000	300,000	275,000	250,000	225,000

ANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

PERJALANAN DINAS	TRANSPORTASI YANG DIGUNAKAN		
	LUAR DAERAH KABUPATEN LAIN (DALAM PROVINSI KALIMANTAN BARAT)	LUAR DAERAH (LUAR PROVINSI KALIMANTAN BARAT)	
		PESAWAT UDARA	BIS
tama	Angkutan Udara, Darat dan Air	Bisnis	Eksekutif
lua	Angkutan Udara, Darat dan Air	Ekonomi	Eksekutif
iga	Angkutan Udara, Darat dan Air	Ekonomi	Eksekutif
mpat	Angkutan Udara, Darat dan Air	Ekonomi	Eksekutif
ima	Angkutan Udara, Darat dan Air	Ekonomi	Eksekutif
nam	Angkutan Udara, Darat dan Air	Ekonomi	Eksekutif

TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KABUPATEN LAIN

LOKASI TUJUAN	TARIF PP (Rp)			KETERANGAN
	UDARA	DARAT	AIR	
Kapuas Hulu	Rp 2,500,000.00	Rp 1,000,000.00		Apabila menggunakan angkutan udara (pesawat) dibayar sesuai dengan harga nyata tiket dan diberikan biaya tranport dari Mempawah - Supadio serta dari bandara setempat ke tempat tujuan sebesar Rp. 500.000,-
Ketapang	Rp 2,500,000.00	Rp 900,000.00	Rp 800,000.00	
Kayong Utara	Rp 2,500,000.00	Rp 750,000.00	Rp 700,000.00	
Sanggau		Rp 500,000.00		
Sekadau		Rp 750,000.00		
Sintang	Rp 2,500,000.00	Rp 800,000.00		
Melawi	Rp 2,500,000.00	Rp 800,000.00		
Landak		Rp 400,000.00		
Bengkayang		Rp 400,000.00		
Sambas		Rp 400,000.00		
Singkawang		Rp 300,000.00		
Kota Pontianak		Rp 300,000.00		
kubu Raya		Rp 300,000.00		
Pontianak		Rp 300,000.00		

BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS KE LUAR DAERAH (DALAM PROVINSI KALIMANTAN BARAT)

TUJUAN	BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD (Rp)	SEKRETARIS DAERAH DAN ANGGOTA DPRD (Rp)	PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III DAN PNS GOLONGAN IV (Rp)	PEJABAT ESELON IV DAN PNS GOLONGAN III (Rp)	PNS GOLONGAN II DAN GOLONGAN I (Rp)
	700,000	600,000	500,000	450,000	400,000	370,000
	700,000	600,000	500,000	450,000	400,000	370,000
	700,000	600,000	500,000	450,000	400,000	370,000
	800,000	700,000	625,000	550,000	500,000	450,000
	800,000	700,000	625,000	550,000	500,000	450,000
	700,000	600,000	500,000	450,000	400,000	370,000
	700,000	600,000	500,000	450,000	400,000	370,000
	700,000	600,000	500,000	450,000	400,000	370,000
	800,000	700,000	625,000	550,000	500,000	450,000
	800,000	700,000	625,000	550,000	500,000	450,000
	800,000	700,000	625,000	550,000	500,000	450,000
	800,000	700,000	625,000	550,000	500,000	450,000
	800,000	700,000	625,000	550,000	500,000	450,000
RA	800,000	700,000	625,000	550,000	500,000	450,000

PORTASI UDARA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

KOTA TUJUAN	TARIF per KELAS PP (Rp)	
	BISNIS	EKONOMI
akarta	5,000,000	3,000,000
ogyakarta	5,000,000	5,000,000
urabaya	6,000,000	6,000,000
ali	7,000,000	7,000,000
atam	4,000,000	4,000,000
arang	3,600,000	2,100,000
	3,600,000	2,200,000
abaya	5,100,000	2,600,000
ng	4,300,000	2,500,000
lung	2,000,000	1,200,000
ia Aceh	7,050,000	4,200,000
an	6,800,000	3,600,000
jkulu	4,100,000	2,450,000
n Baru	5,200,000	2,800,000
ng	5,200,000	2,750,000
nbang	3,600,000	2,200,000
kal Pinang	3,200,000	2,000,000
di	3,800,000	2,300,000
lar Lampung	2,250,000	1,500,000
ngkaraya	4,650,000	2,800,000
papan	6,950,000	3,550,000
armasin	4,950,000	2,800,000
asar	4,950,000	3,100,000
ram	4,950,000	3,100,000
ng	8,800,000	4,750,000
do	10,100,000	4,750,000
ntalo	6,750,000	4,500,000
	8,750,000	4,800,000
ari	7,150,000	3,900,000
isar	6,950,000	3,600,000
on	12,450,000	6,650,000
ite	9,350,000	6,250,000
uju	6,850,000	4,550,000
ura	13,650,000	7,650,000
kwari	15,150,000	10,100,000
	13,150,000	7,050,000
a	12,950,000	7,000,000

TRANSPORTASI BANDARA DAN TRANSPORTASI LOKAL DI TEMPAT TUJUAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

GOLONGAN PERJALANAN DINAS	TRANSPORTASI BANDARA	TRANSPORTASI LOKAL	KETERANGAN
1 Pertama	1,000,000	500,000	1. Transportasi Bandara diberikan untuk perjalanan dari Mempawah menuju Bandara Supadio
1 Kedua	950,000	500,000	
1 Ketiga	900,000	500,000	
1 Keempat	850,000	500,000	2. Transportasi Bandara dan Transportasi Lokal diberikan untuk sekali perjalanan pulang pergi
1 Kelima	800,000	500,000	
1 Keenam	750,000	500,000	

BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS KE LUAR DAERAH (LUAR PROVINSI KALIMANTAN BARAT)

TUJUAN	BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD (Rp)	SEKRETARIS DAERAH DAN ANGGOTA DPRD (Rp)	PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III DAN PNS GOLONGAN IV (Rp)	PEJABAT ESELON IV DAN PNS GOLONGAN III (Rp)	PNS GOLONGAN II DAN GOLONGAN I (Rp)
ACEH D.	1,000,000	800,000	650,000	550,000	510,000	475,000
A UTARA	1,000,000	800,000	650,000	550,000	510,000	475,000
	1,000,000	800,000	650,000	550,000	510,000	475,000
AN RIAU	1,000,000	800,000	650,000	550,000	510,000	475,000
	1,000,000	800,000	650,000	550,000	510,000	475,000
A BARAT	1,000,000	800,000	650,000	550,000	510,000	475,000
A SELATAN	1,000,000	800,000	650,000	550,000	510,000	475,000
	1,000,000	800,000	650,000	550,000	510,000	475,000
U	1,000,000	800,000	650,000	550,000	510,000	475,000
BELITUNG	1,000,000	800,000	650,000	550,000	510,000	475,000
	1,100,000	900,000	750,000	650,000	600,000	550,000
RAT	1,100,000	900,000	750,000	650,000	600,000	550,000
RTA	1,100,000	900,000	750,000	650,000	600,000	550,000
IGAH	1,100,000	900,000	750,000	650,000	600,000	550,000
AKARTA	1,100,000	900,000	750,000	650,000	600,000	550,000
UR	1,100,000	900,000	750,000	650,000	600,000	550,000
	1,200,000	1,000,000	850,000	750,000	700,000	650,000

UANG MAKAN PERJALANAN DINAS KE LUAR DAERAH (DALAM PROVINSI KALIMANTAN BARAT)

TUJUAN	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD	1,000,000	800,000	650,000	550,000	510,000	475,000
SEKRETARIS DAERAH DAN ANGGOTA DPRD	1,100,000	900,000	750,000	650,000	600,000	550,000
PEJABAT ESELON II	1,000,000	800,000	650,000	550,000	510,000	475,000
PEJABAT ESELON III DAN PNS GOLONGAN IV	1,000,000	800,000	650,000	550,000	510,000	475,000
PEJABAT ESELON III DAN PNS GOLONGAN III	1,000,000	800,000	650,000	550,000	510,000	475,000
PNS GOLONGAN II DAN GOLONGAN I	1,100,000	900,000	750,000	650,000	600,000	550,000
	1,000,000	800,000	650,000	550,000	510,000	475,000
	1,000,000	800,000	650,000	550,000	510,000	475,000
	1,000,000	800,000	650,000	550,000	510,000	475,000
	1,100,000	900,000	750,000	650,000	600,000	550,000
	1,000,000	800,000	650,000	550,000	510,000	475,000
	1,000,000	800,000	650,000	550,000	510,000	475,000
	1,100,000	900,000	750,000	650,000	600,000	550,000
	1,100,000	900,000	750,000	650,000	600,000	550,000
	1,100,000	900,000	750,000	650,000	600,000	550,000
	1,100,000	900,000	750,000	650,000	600,000	550,000
	300,000	250,000	200,000	175,000	150,000	125,000
	300,000	250,000	200,000	175,000	150,000	125,000
	350,000	300,000	250,000	225,000	200,000	175,000
	300,000	250,000	200,000	175,000	150,000	125,000

TUJUAN	BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD (Rp)	SEKRETARIS DAERAH DAN ANGGOTA DPRD (Rp)	PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III DAN PNS GOLONGAN IV (Rp)	PEJABAT ESELON IV DAN PNS GOLONGAN III (Rp)	PNS GOLONGAN II DAN GOLONGAN I (Rp)
AK	300,000	250,000	200,000	175,000	150,000	125,000
	350,000	300,000	250,000	225,000	200,000	175,000
	350,000	300,000	250,000	225,000	200,000	175,000
J	350,000	300,000	250,000	225,000	200,000	175,000
U	350,000	300,000	250,000	225,000	200,000	175,000
	350,000	300,000	250,000	225,000	200,000	175,000
HULU	350,000	300,000	250,000	225,000	200,000	175,000
G	350,000	300,000	250,000	225,000	200,000	175,000
UTARA	350,000	300,000	250,000	225,000	200,000	175,000

UANG MAKAN PERJALANAN DINAS KE LUAR DAERAH (LUAR PROVINSI KALIMANTAN BARAT)

TUJUAN	BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD (Rp)	SEKRETARIS DAERAH DAN ANGGOTA DPRD (Rp)	PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III DAN PNS GOLONGAN IV (Rp)	PEJABAT ESELON IV DAN PNS GOLONGAN III (Rp)	PNS GOLONGAN II DAN GOLONGAN I (Rp)
ACEH D.	450,000	400,000	350,000	300,000	275,000	250,000
A UTARA	450,000	400,000	350,000	300,000	275,000	250,000
	450,000	400,000	350,000	300,000	275,000	250,000
AN RIAU	450,000	400,000	350,000	300,000	275,000	250,000
	450,000	400,000	350,000	300,000	275,000	250,000
A BARAT	450,000	400,000	350,000	300,000	275,000	250,000
A SELATAN	450,000	400,000	350,000	300,000	275,000	250,000
	450,000	400,000	350,000	300,000	275,000	250,000
U	450,000	400,000	350,000	300,000	275,000	250,000
BELITUNG	450,000	400,000	350,000	300,000	275,000	250,000

TUJUAN	BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD (Rp)	SEKRETARIS DAERAH DAN ANGGOTA DPRD (Rp)	PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III DAN PNS GOLONGAN IV (Rp)	PEJABAT ESELON IV DAN PNS GOLONGAN III (Rp)	PNS GOLONGAN II DAN GOLONGAN I (Rp)
	475,000	425,000	375,000	325,000	300,000	275,000
ARAT	475,000	425,000	375,000	325,000	300,000	275,000
ARTA	475,000	425,000	375,000	325,000	300,000	275,000
NGAH	475,000	425,000	375,000	325,000	300,000	275,000
YAKARTA	475,000	425,000	375,000	325,000	300,000	275,000
MUR	475,000	425,000	375,000	325,000	300,000	275,000
	575,000	525,000	475,000	425,000	400,000	375,000
	450,000	400,000	350,000	300,000	275,000	250,000
	450,000	400,000	350,000	300,000	275,000	250,000
NGAH	450,000	400,000	350,000	300,000	275,000	250,000
LATAN	450,000	400,000	350,000	300,000	275,000	250,000
MUR	475,000	425,000	375,000	325,000	300,000	275,000
ARA	475,000	425,000	375,000	325,000	300,000	275,000
ALO	475,000	425,000	375,000	325,000	300,000	275,000
RAT	450,000	400,000	350,000	300,000	275,000	250,000
LATAN	475,000	425,000	375,000	325,000	300,000	275,000
YGAH	450,000	400,000	350,000	300,000	275,000	250,000
YGGARA	450,000	400,000	350,000	300,000	275,000	250,000
	475,000	425,000	375,000	325,000	300,000	275,000
UTARA	475,000	425,000	375,000	325,000	300,000	275,000
	475,000	425,000	375,000	325,000	300,000	275,000
IRAT	475,000	425,000	375,000	325,000	300,000	275,000

RUANG SAKU PERJALANAN DINAS KE LUAR DAERAH (DALAM PROVINSI KALIMANTAN BARAT)

TUJUAN	BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD (Rp)	SEKRETARIS DAERAH DAN ANGGOTA DPRD (Rp)	PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III DAN PNS GOLONGAN IV (Rp)	PEJABAT ESELON IV DAN PNS GOLONGAN III (Rp)	PNS GOLONGAN II DAN GOLONGAN I (Rp)
ANG	300,000	250,000	200,000	175,000	150,000	125,000
ANG	300,000	250,000	200,000	175,000	150,000	125,000
	300,000	250,000	200,000	175,000	150,000	125,000
YA	300,000	250,000	200,000	175,000	150,000	125,000
AK	300,000	250,000	200,000	175,000	150,000	125,000
	300,000	250,000	200,000	175,000	150,000	125,000
	300,000	250,000	200,000	175,000	150,000	125,000
	300,000	250,000	200,000	175,000	150,000	125,000
	300,000	250,000	200,000	175,000	150,000	125,000
	300,000	250,000	200,000	175,000	150,000	125,000
	300,000	250,000	200,000	175,000	150,000	125,000
HULU	300,000	250,000	200,000	175,000	150,000	125,000
	300,000	250,000	200,000	175,000	150,000	125,000
UTARA	300,000	250,000	200,000	175,000	150,000	125,000

RUANG SAKU PERJALANAN DINAS KE LUAR DAERAH (LUAR PROVINSI KALIMANTAN BARAT)

TUJUAN	BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD (Rp)	SEKRETARIS DAERAH DAN ANGGOTA DPRD (Rp)	PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III DAN PNS GOLONGAN IV (Rp)	PEJABAT ESELON IV DAN PNS GOLONGAN III (Rp)	PNS GOLONGAN II DAN GOLONGAN I (Rp)
ACEH D.	900,000	700,000	550,000	500,000	475,000	450,000
UTARA	900,000	700,000	550,000	500,000	475,000	450,000
	900,000	700,000	550,000	500,000	475,000	450,000
N RIAU	900,000	700,000	550,000	500,000	475,000	450,000
	900,000	700,000	550,000	500,000	475,000	450,000

TUJUAN	BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD (Rp)	SEKRETARIS DAERAH DAN ANGGOTA DPRD (Rp)	PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III DAN PNS GOLONGAN IV (Rp)	PEJABAT ESELON IV DAN PNS GOLONGAN III (Rp)	PNS GOLONGAN II DAN GOLONGAN I (Rp)
LA BARAT	900,000	700,000	550,000	500,000	475,000	450,000
LA SELATAN	900,000	700,000	550,000	500,000	475,000	450,000
i	900,000	700,000	550,000	500,000	475,000	450,000
U	900,000	700,000	550,000	500,000	475,000	450,000
BELITUNG	900,000	700,000	550,000	500,000	475,000	450,000
	1,000,000	800,000	650,000	600,000	575,000	550,000
RAT	1,000,000	800,000	650,000	600,000	575,000	550,000
RTA	1,000,000	800,000	650,000	600,000	575,000	550,000
YGAH	1,000,000	800,000	650,000	600,000	575,000	550,000
AKARTA	1,000,000	800,000	650,000	600,000	575,000	550,000
IUR	1,000,000	800,000	650,000	600,000	575,000	550,000
	1,100,000	900,000	750,000	700,000	675,000	650,000
	900,000	700,000	550,000	500,000	475,000	450,000
	900,000	700,000	550,000	500,000	475,000	450,000
IGAH	900,000	700,000	550,000	500,000	475,000	450,000
ATAN	900,000	700,000	550,000	500,000	475,000	450,000
UR	1,000,000	800,000	650,000	600,000	575,000	550,000
RA	1,000,000	800,000	650,000	600,000	575,000	550,000
LO	1,000,000	800,000	650,000	600,000	575,000	550,000
AT	900,000	700,000	550,000	500,000	475,000	450,000
ATAN	1,000,000	800,000	650,000	600,000	575,000	550,000
GAH	900,000	700,000	550,000	500,000	475,000	450,000
GGARA	900,000	700,000	550,000	500,000	475,000	450,000
	1,000,000	800,000	650,000	600,000	575,000	550,000
ITARA	1,000,000	800,000	650,000	600,000	575,000	550,000
	1,000,000	800,000	650,000	600,000	575,000	550,000
RAT	1,000,000	800,000	650,000	600,000	575,000	550,000

MOR : 6 TAHUN 2014

YGGAL : 28 Januari 2014

YANG : Perjalanan Dinas Dalam Negeri atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak

UANG REPRESENTASI BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI

URAIAN / TUJUAN	BESARAN / HARI	
	KELUAR DAERAH / PROPINSI	KEDALAM DAERAH
BUPATI dan PIMPINAN DPRD	250,000	250,000
WAKIL BUNDAWALAN II dan ANGGOTA DPRD	130,000	130,000

BUPATI PONTIANAK,

ttd

RIA NORSAN

ditandatangani di Mempawah

tanggal 3 - 2 - 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

ttd

FIRMAN JULI PURNAMA

DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

Tahun 2014 NOMOR 6



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH

JULI SURYADI B

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR : 6 TAHUN 2014

TANGGAL : 28 - 1 - 2014

TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PONTIANAK

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR

DASAR :

MENUGASKAN :

Kepada : 1. Nama :
Pangkat :
NIP :
Jabatan :

2. Nama :
Pangkat :
NIP :
Jabatan :

Untuk : 1.
2.
3.

Dikeluarkan di : Mempawah
Pada Tanggal :

An. Bupati Pontianak
Sekretaris Daerah,
ttd

NAMA JELAS
PANGKAT
NIP

Tembusan :

1.
2.

BUPATI PONTIANAK,
ttd

RIA NORSAN

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 3 - 2 - 2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

ttd

FIRMAN JULI PURNAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2014 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
KABUPATEN PONTIANAK

LAMPIRAN IV **PERATURAN BUPATI PONTIANAK**
NOMOR : 6 TAHUN 2014
TANGGAL : 28 - 1 - 2014
TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PONTIANAK

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Nomor :
Lembaran ke :
SURAT PERJALANAN DINAS
(SPD)

1. Pejabat yang memberi perintah :
2. Nama Pegawai yang diperintah :
3. a. Pangkat dan Golongan :
- b. Jabatan :
- c. Tingkat menurut peraturan perjalanan :
4. Maksud Perjalanan Dinas :

5. Alat angkut yang dipergunakan :

6. a. Tempat berangkat :
- b. Tempat tujuan :

7. a. Lamanya Perjalanan Dinas :
- b. Tanggal berangkat :
- c. Tanggal harus kembali :

8. Pengikut :

9. Pembebanan Anggaran :
- a. Instansi :
- b. Mata Anggaran :

10. Keterangan lain-lain :

Mempawah,2014

An. Bupati Pontianak
Sekretaris Daerah,
ttd

NAMA JELAS
PANGKAT
Nip

BUPATI PONTIANAK,
ttd

RIA NORSAN

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 3 - 2 - 2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
ttd

FIRMAN JULI PURNAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR : 6 TAHUN 2014

TANGGAL : 28 - 1 - 2014

TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

SPD No. :

Berangkat dari :
(tempat kedudukan)

Pada Tanggal :

Ke :

An. Bupati Pontianak
Sekretaris Daerah,

ttd

NAMA JELAS

PANGKAT

NIP

II. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Pada tanggal :

III. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Pada tanggal :

IV. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Pada tanggal :

V. Tiba kembali di :
Pada tanggal :

Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa Perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

An. Bupati Pontianak
Sekretaris Daerah,

ttd

NAMA JELAS

PANGKAT

NIP

VI. CATATAN LAIN-LAIN

VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, Pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan Peraturan-Peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.

BUPATI PONTIANAK,
ttd

RIA NORSEAN

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 3 - 2 - 2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

ttd

FIRMAN JULI PURNAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2014